PEMERINTAH
KABUPATEN WONOGIRI

SALINAN



PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI

TAHUN 2026

SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 91 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang :

a. bahwa perencanaan pembangunan dibutuhkan untuk memastikan pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam rangka menjamin pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak nyata pada masyarakat, perlu adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dalam suatu rencana kerja Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
d. bahwa setelah diundangkannya Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 87 Tahun 2026 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 tahun 2020 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 206);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 209);
16. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 87 Tahun 2026 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.

3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan rencana kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri;
   b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri;
   c. Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri;
   d. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Wonogiri;
   e. Perubahan Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wonogiri;
   f. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri;
   g. Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri;
   h. Renja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri;
   i. Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri;
   j. Perubahan Renja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri;
   k. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;
   l. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Wonogiri;
   m. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri;
   n. Perubahan Renja Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Wonogiri;
   o. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri;
   p. Perubahan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Wonogiri;
   q. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonogiri;

r. Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri;
s. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wonogiri;
t. Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri;
u. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Wonogiri;
v. Perubahan Renja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Wonogiri;
w. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wonogiri;
x. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri;
y. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri;
z. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonogiri;
aa. Perubahan Renja Kecamatan Wonogiri;
bb. Perubahan Renja Kecamatan Selogiri;
cc. Perubahan Renja Kecamatan Nguntoronadi;
dd. Perubahan Renja Kecamatan Ngadirojo;
ee. Perubahan Renja Kecamatan Wuryantoro;
ff. Perubahan Renja Kecamatan Manyaran;
gg. Perubahan Renja Kecamatan Baturetno;
hh. Perubahan Renja Kecamatan Giriwoyo;
ii. Perubahan Renja Kecamatan Jatisrono;
jj. Perubahan Renja Kecamatan Jatiroto;
kk. Perubahan Renja Kecamatan Eromoko;
ll. Perubahan Renja Kecamatan Pracimantoro;
mm. Perubahan Renja Kecamatan Purwantoro;
nn. Perubahan Renja Kecamatan Kismantoro;
oo. Perubahan Renja Kecamatan Batuwarno;
pp. Perubahan Renja Kecamatan Karangtengah;
qq. Perubahan Renja Kecamatan Giritontro;
rr. Perubahan Renja Kecamatan Paranggupito;
ss. Perubahan Renja Kecamatan Jatipurno;
tt. Perubahan Renja Kecamatan Slogohimo;
uu. Perubahan Renja Kecamatan Tirtomoyo;
vv. Perubahan Renja Kecamatan Sidoharjo;
ww. Perubahan Renja Kecamatan Girimarto;
xx. Perubahan Renja Kecamatan Bulukerto; dan
yy. Perubahan Renja Kecamatan Puhpelem.

(3) Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 7 Agustus 2026

BUPATI WONOGIRI,

ttd

SETYO SUKARNO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 7 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

ttd

FX. PRANATA

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

F.MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 19740519 199903 2 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 91 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

I. PENDAHULUAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 87 Tahun 2026 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 disusun sebagai tindak lanjut dari Perubahan RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 yang menjadi pedoman dalam penyesuaian target kinerja, indikator, lokasi kegiatan, pagu anggaran, serta sasaran pembangunan daerah. Penyesuaian tersebut dilakukan agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah secara efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika pembangunan.

Selain itu, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 sampai dengan semester pertama menunjukkan adanya perkembangan yang memerlukan penyesuaian, baik dari sisi capaian kinerja, realisasi fisik dan keuangan, perubahan regulasi, kebijakan nasional maupun daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Perubahan tersebut mengakibatkan perlunya penyesuaian terhadap target indikator kinerja, keluaran (output), hasil (outcome), lokasi kegiatan, maupun kebutuhan pendanaan sehingga pelaksanaan pembangunan tetap berjalan secara optimal.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 juga dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Wonogiri diharapkan tetap selaras dengan sasaran pembangunan daerah, prioritas nasional, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

II. RINCIAN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri;
b. Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri;
c. Inspektorat Daerah Kabupaten Wonogiri;
d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wonogiri;
e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wonogiri;
f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri;
g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri;
h. Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri;
i. Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri;
j. Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri;
k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;
l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonogiri;
m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri;
n. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonogiri;
o. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri;
q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonogiri;
r. Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri;
s. Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wonogiri;
t. Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri;
u. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Wonogiri;
v. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Wonogiri;
w. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wonogiri;
x. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri;
y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri;
z. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonogiri;
aa. Kecamatan Wonogiri;
ab. Kecamatan Selogiri;
ac. Kecamatan Nguntoronadi;
ad. Kecamatan Ngadirojo;

ae. Kecamatan Wuryantoro;
af. Kecamatan Manyaran;
ag. Kecamatan Baturetno;
ah. Kecamatan Giriwoyo;
ai. Kecamatan Jatisrono;
aj. Kecamatan Jatiroto;
ak. Kecamatan Eromoko;
al. Kecamatan Pracimantoro;
am. Kecamatan Purwantoro;
an. Kecamatan Kismantoro;
ao. Kecamatan Batuwarno;
ap. Kecamatan Karangtengah;
aq. Kecamatan Giritontro;
ar. Kecamatan Paranggupito;
as. Kecamatan Jatipurno
at. Kecamatan Slogohimo
au. Kecamatan Tirtomoyo
av. Kecamatan Sidoharjo
aw. Kecamatan Girimarto
ax. Kecamatan Bulukerto
ay Kecamatan Puhpelem

Seluruh dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 sebagai berikut.

PEMERINTAH
KABUPATEN WONOGIRI



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

INSPEKTORAT

KABUPATEN WONOGIRI

TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA

INSPEKTORAT

KABUPATEN WONOGIRI

TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (tahun). Dalam penyusunan dokumen renja PD, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan BAPPERIDA (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah) serta dengan pemangku kepentingan.

Adapun tahapan-tahapan yang perlu dilalui dalam proses penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan

   Persiapan penyusunan Renja PD meliputi:

   a. Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;

   b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;

c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup:

a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala BAPPERIDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. BAPPERIDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah dan harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPERIDA. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan.

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPERIDA untuk diverifikasi. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya. BAPPERIDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Kemudian dalam rangka pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2026, dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan serta pelaksanaan anggaran tahun berjalan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa usulan perubahan yang diajukan didasarkan pada kebutuhan riil pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, perkembangan kondisi aktual, perubahan regulasi, serta hasil evaluasi capaian kinerja perangkat daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Inspektorat Kabupaten Wonogiri memandang perlu melakukan penyesuaian terhadap target kinerja dan alokasi anggaran pada beberapa program, kegiatan, dan subkegiatan. Penyesuaian ini merupakan tindak lanjut atas perubahan kebijakan dan regulasi yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Salah satu perubahan yang berpengaruh adalah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 yang menghapus pelaksanaan aktivitas reviu Rencana Kerja (Renja) dan reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), sehingga kedua aktivitas tersebut tidak lagi dimuat dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Selain itu, pada Tahun Anggaran 2026 juga dilakukan efisiensi anggaran yang berdampak pada ruang lingkup pelaksanaan reviu Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU SG) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Apabila pada tahun sebelumnya reviu mencakup DAU SG bidang Kesehatan, Pendidikan, Gaji PPPK, serta berbagai bidang DAK seperti Pertanian, Pendidikan, Irigasi, Sanitasi, Air Minum, dan bidang lainnya, maka pada tahun 2026 pelaksanaannya hanya mencakup DAU SG Dana Kelurahan dan DAK Jalan.

Perubahan kebijakan dan efisiensi anggaran tersebut berdampak pada penyesuaian target kinerja, khususnya indikator Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, yang semula ditargetkan sebanyak 130 laporan menjadi 100 laporan. Penyesuaian tersebut juga diikuti dengan perubahan target dan alokasi anggaran pada program, kegiatan, dan subkegiatan yang terdampak agar tetap selaras dengan kebijakan yang berlaku serta kebutuhan pelaksanaan tugas pengawasan.

Selain itu, penyesuaian juga dilakukan sebagai tindak lanjut atas Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor HM.02.00/S-853/K/D4/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Penyampaian Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 mengenai Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut diterbitkan sebagai implementasi pemberlakuan *Global Internal Audit Standards* (GIAS) 2024 dan menggantikan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021. Perubahan standar tersebut berimplikasi pada meningkatnya persyaratan pemenuhan kapabilitas APIP serta berpotensi memengaruhi capaian level kapabilitas APIP pemerintah daerah dibandingkan dengan penilaian pada tahun-tahun sebelumnya. Penurunan level ini mengarah pada level yang secara riil menunjukkan kapabilitas APIP dalam melakukan perbaikan tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern serta pengendalian kecurangan, sehingga APIP dapat memberikan nilai tambah dan mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah. Berdasar Surat Kepala BPKP dimaksud, terdapat himbauan kepada Kepala Daerah untuk mempertimbangkan penyesuaian target kinerja peningkatan kapabilitas APIP pada dokumen perencanaan.

Dalam RPJMD/Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 target Kapabilitas APIP adalah Level 3. Dengan adanya potensi penurunan Level akan berpengaruh pada Capaian Kinerja Organisasi khususnya pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri maka dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026 ini akan dilakukan penyesuaian target atas Kapabilitas APIP menjadi Level 2 sesuai arahan BPKP tersebut dan berdasarkan surat yang telah kami kirimkan ke Bupati tembusan Bapperida Nomor : B/195/700.1.2/II/2026 tanggal 18 Februari 2026 terkait penyampaian atas penurunan target Level Kapabilitas APIP di tahun 2026 sampai dengan akhir Renstra tahun 2029.

Selain penyesuaian target kinerja, dalam Perubahan Renja Tahun 2026 juga dilakukan penambahan alokasi anggaran sebagai tindak lanjut atas perubahan kebijakan di bidang pengawasan serta meningkatnya kebutuhan penyelenggaraan tugas APIP. Penambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung peningkatan kompetensi APIP melalui pendidikan dan pelatihan, pemenuhan sarana pendukung kerja, serta penguatan pelaksanaan tugas pengawasan dan kegiatan koordinasi serta supervisi pencegahan korupsi, sehingga pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja dapat berjalan secara lebih efektif dan optimal.

Dengan demikian, Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2026, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah, serta kebutuhan aktual dalam mendukung penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah daerah secara optimal.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum disusunnya Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dearah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikiasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikiasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 175);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 206);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 209);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 210);

17. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2025 Nomor 35);
18. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Derah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 122 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 122).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, gambaran, dan arah pembangunan bidang pengawasan di Kabupaten Wonogiri dalam jangka pendek (satu tahun) yaitu untuk tahun 2026. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi lebih terarah, efektif, efisien dan terukur dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut :

a) Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perangkat Daerah;
b) Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV tahun 2026; dan
c) Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan dokumen ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)
- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

BAB IV PENUTUP
- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Manajemen Risiko
- 4.4 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD dan RKPD, bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD Peranhgkat Daerah.

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri pada tahun berjalan 2026, dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran/output yang direncanakan;
2. Mengetahui realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran/output yang direncanakan;
3. Mengetahui realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran/output yang direncanakan;

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi tersebut dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 ditampilkan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Kinerja s.d Triwulan II			KET
1	2	3	4		5	6		7	8
			K		RP	K		RP	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**7.233.794.616**	**100**	**%**	**3.476.999.108**	
		Nilai Kematangan Organisasi Inspektorat	**47**	**Angka**		**n/a**	**Angka**		
		Nilai SAKIP Inspektorat	**81**	**Angka**		**80,1**	**Angka**		
		Jumlah Inovasi Perangkat Inspektorat	**1**	**Angka**		**n/a**	**Angka**		
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	100	%	1.927.000	33,33	%	1.470.000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	987.000	1	Dokumen	980.000	
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	940.000	1	Laporan	490.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	2	Jenis	6.692.929.956	2	Jenis	3.301.341.854	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	Orang / Bulan	6.677.241.956	44	Orang / Bulan	3.297.263.854	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Kinerja s.d Triwulan II			KET
1	2	3	4		5	6		7	8
			K		RP	K		RP	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	15.194.000	1	Laporan	3.850.000	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13	Laporan	494.000	7	Laporan	228.000	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi BMD	100	%	462.500	40	%	-	
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dokumen	462.500	2	Dokumen	-	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100	%	122.080.000	100	%	51.615.236	
1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24	Dokumen	1.040.000	12	Dokumen	-	
1.4.2	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dokumen	1.040.000	2	Dokumen	296.000	
1.4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	Orang	120.000.000	18	Orang	51.319.236	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Kinerja s.d Triwulan II			KET
1	2	3	4		5	6		7	8
			K		RP	K		RP	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100	%	128.752.810	100	%	18.171.450	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.867.200	0	Paket	257.000	
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	55.900.060	0	Paket	11.152.550	
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1.975.200	0	Paket	450.000	
1.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	19.999.900	0	Paket	1.239.000	
1.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tarnu	2	Laporan	6.176.000	1	Laporan	3.147.900	
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	40.033.450	1	Laporan	1.925.000	
1.5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dokumen	955.000	1	Dokumen	-	
1.5.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	846.000	1	Dokumen	-	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Kinerja s.d Triwulan II			KET
1	2	3	4		5	6		7	8
			K		RP	K		RP	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	100	%	169.260.000	50	%	74.102.239	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Laporan	1.000.000	1	Laporan	1.000.000	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Laporan	47.300.000	1	Laporan	17.520.321	
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Laporan	120.960.000	1	Laporan	55.581.918	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100	%	118.382.350	29,63	%	30.298.329	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	20680350	1	Unit	8.704.000	
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Unit	82.180.000	2	Unit	17.324.229	
1.7.3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	Unit	990.000	1	Unit	483.000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Kinerja s.d Triwulan II			KET
1	2	3	4		5	6		7	8
			K		RP	K		RP	
1.7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	7500000	4	Unit	3.300.000	
1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	7032000	0	Unit	487.100	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan**	**86**	**%**	**218.898.202**	**33,7**	**%**	**60.311.626**	
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	100	%	92.192.290	66,67	%	24.423.040	
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	9	Laporan	5.509.830	4	Laporan	1.530.000	
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3	Laporan	6.400.000	2	Laporan	4.020.040	
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	50	Laporan	5.890.000	50	Laporan	1.880.000	
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1	Laporan	5.900.000	1	Laporan	4.448.000	
2.1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	22	Laporan	49.963.710	7	Laporan	12.345.000	
2.1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang.Terbentuk	1	Kesepakatan	505.000	1	Kesepakatan	-	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Kinerja s.d Triwulan II			KET
1	2	3	4		5	6		7	8
			K		RP	K		RP	
2.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	37	Dokumen	18.023.750	17	Dokumen	200.000	
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	100	%	126.705.912	42,16	%	35.888.586	
2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2	Laporan	900.000	1	Laporan	600.000	
2.2.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan DenganTujuan Tertentu	100	Laporan	125.805.912	42	Laporan	35.288.586	
3	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengendalian intern perangkat daerah dan penguatan integritas**	**100**	**%**	**40.369.488**	**100**	**%**	**9.965.061**	
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	1	Dokumen	11.000.170	0	Dokumen	2.143.000	
3.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	1.000.170	0	Rekomendasi	-	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Kinerja s.d Triwulan II			KET
1	2	3	4		5	6		7	8
			K		RP	K		RP	
3.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	10.000.000	0	Rekomendasi	2.143.000	
3.2	Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	100	%	29.369.318	98,06	%	7.822.061	
3.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	50	Perangkat Daerah	8.525.000	50	Perangkat Daerah	2.250.000	
3.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	50	Perangkat Daerah	985.000	50	Perangkat Daerah	-	
3.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	Kegiatan	18.459.318	2	Kegiatan	5.171.961	
3.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasl Penegakan Integritas	50	Perangkat Daerah	1.400.000	50	Perangkat Daerah	400.100	
TOTAL					**7.493.062.306**			**3.547.275.795**	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029, masing-masing Perangkat Daerah telah ditetapkan indikator kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah tersebut. Sehingga dalam pengukuran kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Wonogiri berpedoman pada indikator yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis tersebut. Adapun Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Wonogiri di tahun 2026 adalah Level Maturitas SPIP.

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, capaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Wonogiri juga diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) *outcome* yaitu Level Maturitas SPIP, Level Kapabilitas APIP, Indeks Manajemen Risiko dan Persentase Tindak Lanjut BPK RI. Capaian pada masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Kabupaten Wonogiri berdasarkan realisasi Tahun 2023, 2024, 2025 serta Proyeksi Tahun 2026, secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
INSPEKTORAT

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Inspektorat Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				Proyeksi	Catatan Analisis
					1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	Tahun 2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025-2029														
A	TUJUAN														
1.	Level Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	3	-	3	3	3	3	3	2 (Skor : 2,963)	n/a	n/a	n/a	3	Belum dapat mencapai target karena kurang optimalnya kinerja dalam penentuan tujuan, manajemen risiko dan pencapaian tujuannya. Meskipun demikian, capaian tersebut menunjukkan tren yang positif karena telah mendekati target Level 3. Diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan melalui penguatan implementasi SPIP dan manajemen risiko pada seluruh perangkat daerah agar target Renstra dapat tercapai pada tahun 2029.
B	SASARAN														
1.	Level Kapabilitas APIP	-	3	-	3	2	2	2	2	2 (Skor : 2,240)	n/a	n/a	n/a	2	Capaian 2025 di Level 2 dengan skor 2,240 karena adanya perubahan penilaian sehingga diperlukan perubahan target dari yang telah tertuang di Renstra menjadi Level 2 sesuai arahan dalam surat edaran dari BPKP untuk penyesuaian target Level Kapabilitas APIP.
2.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	-	-	-	3,036	3,05	3,075	3,1	3,1	3,000	n/a	n/a	n/a	3,1	Capaian Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) Tahun 2025 sebesar 3,000 masih belum mencapai target Renstra sebesar 3,036. Kondisi ini menunjukkan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Inspektorat Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				Proyeksi	Catatan Analisis
					1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	Tahun 2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
															bahwa implementasi upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa area yang perlu diperkuat, terutama dalam pemenuhan indikator pencegahan korupsi, penguatan tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, serta pengendalian intern. Diperlukan sinergi dan komitmen seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pencegahan korupsi agar target Renstra dapat tercapai pada tahun-tahun berikutnya.
3.	IKM Inspektorat	-	-	-	85,9	86	86,2	86,5	86,5	85,9	n/a	n/a	n/a	86,5	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat Tahun 2025 sebesar 85,9 telah memenuhi target Renstra Tahun 2025 sebesar 85,9. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan Inspektorat telah sesuai dengan harapan pengguna layanan. Meskipun demikian, upaya peningkatan kualitas pelayanan perlu terus dilakukan melalui perbaikan berkelanjutan terhadap standar pelayanan, kompetensi petugas, sarana prasarana, serta tindak lanjut atas masukan dan pengaduan masyarakat guna mempertahankan dan meningkatkan tingkat kepuasan pada tahun-tahun mendatang.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah maka ditentukan 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk pelaporan tahun anggaran 2025 yaitu : Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, Manajemen Risiko Indeks dan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK-RI Tahun Anggaran N-1.

Maturitas SPIP pengukurannya adalah berdasarkan hasil Quality Assurance (QA) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah nomor PE.09.03/LHP-886/PW11/3.2/2025 tanggal 30 Desember 2025 diperoleh skor maturitas SPIP sebesar 2,963 (Level 2). Dalam rangka terus meningkatkan pemahaman akan SPIP, Inspektorat Kabupaten Wonogiri melaksanakan kegiatan Evaluasi SPIP dan berkoordinasi secara aktif dengan Satuan Tugas (Satgas) SPIP Kabupaten serta menjalin komunikasi dengan BPKP selaku Pembina SPIP. Selain itu, Inspektorat Kabupaten Wonogiri senantiasa membuka pintu konsultasi dan koordinasi.

Ukuran capaian atas Kapabilitas APIP adalah berdasarkan Hasil Penilaian Level Kapabilitas APIP oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan metode Internal Audit Capability Models (IACM). Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 2 pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri Nomor PE.09.03/LHP-134/PW11/6/2026, Tanggal 24 April 2026 diperoleh skor Kapabilitas APIP 2,240 (Level 2).

Penurunan hasil ini dikarenakan adanya perubahan regulasi dalam penilaian Kapabilitas APIP sesuai Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor HM.02.00/S-853/K/D4/2025 Tanggal 1 Desember 2025 Hal Penyampaian Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Dengan adanya perubahan standar audit internal global, yaitu dengan diberlakukannya Global Internal Audit Standards (GIAS) 2024 maka BPKP menerbitkan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasanan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai

pengganti Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasanan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penerapan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 dapat berdampak kepada potensi penurunan capaian level kapabilitas APIP Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya dibandingkan dengan Tahun 2024. Penurunan level ini mengarah pada level yang secara riil menunjukkan kapabilitas APIP dalam melakukan perbaikan tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern serta pengendalian kecurangan, sehingga APIP dapat memberikan nilai tambah dan mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

Berdasar Surat Kepala BPKP dimaksud, terdapat himbauan kepada Kepala Daerah untuk mempertimbangkan penyesuaian target kinerja peningkatan kapabilitas APIP pada dokumen perencanaan. Dalam RPJMD/Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 target Kapabilitas APIP adalah Level 3. Dengan adanya potensi penurunan Level akan berpengaruh pada Capaian Kinerja Organisasi khususnya pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri maka dalam penyusunan Renja ini akan dilakukan penyesuaian target atas Kapabilitas APIP menjadi Level 2 sesuai arahan BPKP tersebut dan berdasarkan surat yang telah kami kirimkan ke Bupati tembusan Bapperida Nomor : B/195/700.1.2/II/2026 tanggal 18 Februari 2026 terkait penyampaian atas penurunan target Level Kapabilitas APIP di tahun 2026 sampai dengan akhir Renstra tahun 2029.

Sementara indikator IKK atas Manajemen Risiko Indeks dan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK-RI Tahun Anggaran N-1 merupakan indikator IKK baru yang muncul atas penyampaian LPPD Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan di tahun 2026. Namun aktivitas dalam mendukung pencapaian kedua IKK tambahan tersebut tidak menjadi indikator dalam tujuan maupun sasaran karena telah masuk dalam sub kegiatan “Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP” yang difokuskan untuk memonitoring tindak lanjut hasil pengawasan dari BPK RI dan APIP. Kemudian sub kegiatan “Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah” yang difokuskan untuk aktivitas atas pendampingan dan evaluasi register risiko dan monitoring implementasi rencana tindak pengendaliannya.

Kemudian sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dimana indikator atas tujuan maksimal adalah 1, maka ditetapkan Keputusan

Inspektur Nomor 7 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Wonogiri atas indikator tujuan yaitu “Level Maturitas SPIP” seperti yang telah ditampilkan dalam Tabel 2.2.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu-isu penting dalam kegiatan pengawasan di Kabupaten Wonogiri adalah :

1. dinamika regulasi dari Pemerintah Pusat sangat berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri, yang seringkali berdampak pada bertambahnya tugas – tugas yang belum dapat ditampung saat penyusunan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan). Kondisi ini mengharuskan Inspektorat Kabupaten Wonogiri mempunyai daya adaptasi yang tinggi, hal ini tentunya harus didukung dengan kecukupan kualitas dan kuantitas SDM APIP;
2. kapasitas dan kecukupan SDM APIP yang berkompeten menjadi permasalahan yang cukup penting dalam meningkatkan kualitas hasil pengawasan. Hal ini disebabkan regenerasi yang belum dapat mengimbangi berkurangnya jumlah APIP akibat memasuki masa pensiun;
3. adaptasi dan penerapan kemajuan teknologi informasi di lingkungan kerja;
4. peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi;

Kemudian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Kabupaten Wonogiri masih menghadapi beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Permasalahan tersebut antara lain :

1. kesadaran para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah masih belum optimal terhadap arti penting fungsi pengawasan dan implementasi Manajemen Risiko;
2. kurangnya perhatian dan tanggapan Pimpinan Satuan Kerja yang menjadi obyek pemeriksaan terhadap saran dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Aparat Pengawasan Fungsional serta terjadinya temuan berulang pada pemeriksaan berikutnya;
3. kualitas, kuantitas dan integritas SDM Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri masih perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan tenaga pengawas yang profesional;
4. sarana penunjang operasional pengawasan dirasakan belum memadai, diantaranya sarana kantor, serta sarana dan prasarana lainnya.

Namun demikian dengan keterbatasan sumber daya serta kendala-kendala lainnya yang dihadapi, Inspektorat Kabupaten Wonogiri telah berusaha dengan optimal untuk tetap konsisten terhadap rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

Kemudian selain isu dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, masih terdapat beberapa tantangan dan peluang bagi Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai aparat pengawas internal Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Tantangan :
    a. kondisi dinamis dimana fokus pemeriksaan yang selalu berganti dan semakin mendalam dalam pemeriksaan yang dilaksanakan khususnya oleh BPK RI, merupakan tantangan yang harus dihadapi, sehingga penguatan pengetahuan dari sisi sumber daya manusia menjadi sangat penting;
    b. Sumber Daya Manusia yang cenderung berkurang secara kuantitas dikarenakan mutasi maupun purna tugas mengakibatkan beban kerja yang diampu oleh tenaga APIP semakin tinggi. Sementara jumlah Obyek pemeriksaan bertambah secara kuantitas dan semakin kompleks permasalahannya.
2. Peluang :
    a. peningkatan kapasitas tenaga APIP dengan melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) atau melalui Pendidikan dan Pelatihan terkait permasalahan-permasalahan yang aktual;

b. dukungan dan arahan dari pimpinan untuk meningkatkan semangat kinerja pegawai dengan adanya *reward* setiap tahun bagi pegawai dengan kinerja paling baik;
c. komitmen seluruh pegawai dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi.

Selain memahami isu, permasalahan serta tantangan dan peluang yang ada, perlu diuraikan juga beberapa dampak yang mungkin terjadi jika Inspektorat Kabupaten Wonogiri belum dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk menghadapai berbagai tantangan, isu dan permasalahan tersebut, yaitu :

1. jika tidak diikuti dengan peningkatan kompetensi APIP, cakupan pengawasan yang semakin luas dan menyusutnya jumlah pemeriksa menimbulkan risiko terhadap pelanggaran/ penyimpangan terlewatkan oleh pengawasan APIP, namun ditemukan oleh aparat pengawas eksternal (BPK RI);
2. tanpa adanya dukungan dan arahan dari pimpinan akan berpengaruh terhadap kinerja APIP sehingga tidak ada konsistensi dalam upaya pencapaian target kinerja.

Berdasarkan dinamika isu strategis serta tantangan dan peluang yang ada, Inspektorat Kabupaten Wonogiri memerlukan strategi pengawasan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis risiko untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam periode perencanaan 2026. Kemudian untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan guna mencapai tujuan dan sasaran daerah pada umumnya serta Inspektorat Kabupaten Wonogiri pada khususnya, maka dirumuskan 3 program, 11 kegiatan dan 40 sub kegiatan dengan uraian rencana pelaksanaannya di tahun 2026 sebagaimana yang akan diuraikan di Bab III.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri dirumuskan untuk mendukung misi kedua Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Berdasarkan pada misi ketiga Kabupaten Wonogiri diatas, maka ditetapkan tujuan dari Inspektorat Kabupaten Wonogiri yaitu “Meningkatkan kualitas pengawasan intern dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan”.

Dengan mendasarkan misi ketiga Kepala Daerah dan tujuan Inspektorat Kabupaten Wonogiri, maka dapat ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan indikatornya adalah Level Kapabilitas APIP dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK);
2. meningkatnya kinerja Inspektorat dengan indikator IKM Inspektorat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan pertama Inspektorat Kabupaten Wonogiri yaitu “Meningkatkan efektivitas peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi” yang didukung dengan sasaran meningkatnya efektivitas pengawasan dilakukan strategi sebagi berikut :

1. peningkatan peran APIP dalam memberikan *early warning system* kepada Kepala Daerah dengan arah kebijakannya adalah mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai *consultant dan quality assurance*;
2. peningkatan kapasitas SDM di bidang pengawasan dengan arah kebijakannya adalah mengembangkan sumber daya aparatur pengawasan yang profesional dan kompeten, dan
3. optimalisasi manajemen risiko sebagai upaya peningkatan pengendalian intern dengan arah kebijakannya mendorong peran aktif dari mitra kerja untuk mengidentifikasi risiko dan kelemahan yang ada guna mengefektifkan kegiatan pengawasan.

3.2 Program dan Kegiatan

Dalam upaya mencapai target kinerja, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, di tahun 2026 dalam periode tahun 2025-2029 ditetapkan sebanyak 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan, baik Program Urusan maupun Program Penunjang Urusan yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 dengan pendanaan di tahun 2026 menyesuaikan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 152 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 tanggal 8 Juni 2026.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua periode RPJMD tahun 2025-2029, dimana pada tahun ini Inspektorat harus menjalankan tugas utamanya untuk melakukan pengawasan intern, baik pengawasan rutin maupun pengawasan dengan mandatori. Selain itu, Inspektorat juga terus berupaya dalam peningkatan kompetensi APIP dalam membantu kelancaran proses pengawasan yang saat ini semakin bervariatif dengan berbagai ketentuan yang terus berkembang.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Wonogiri

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		INSPEKTORAT DAERAH							**8.555.720.000,00**	**7.492.474.306,00**	**7.493.062.306,00**	**-1.062.657.694,00**							**11.543.425.225,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.555.720.000,00**	**7.492.474.306,00**	**7.493.062.306,00**	**-1.062.657.694,00**							**11.543.425.225,00**	
	6,01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**8.555.720.000,00**	**7.492.474.306,00**	**7.493.062.306,00**	**-1.062.657.694,00**							**11.543.425.225,00**	
1	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**8.005.981.160,00**	**7.233.206.616,00**	**7.233.794.616,00**	**-772.186.544,00**							**10.581.475.225,00**	
		[Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah]	**Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**										**100 Persen**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah]	**Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah**	**41**	**38**	**47**	**39**	**47**										**47**		
		[Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah]	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**82,5**	**80,25**	**80,25**	**81**	**81**										**81,5**		
		[Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah]	**Jumlah Inovasi Perangkat Daerah**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**										**1**		
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun*	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1.927.000,00	1.927.000,00	1.927.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	100 persen	4.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.					
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	987.000,00	987.000,00	987.000,00	0,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		5 Dokumen	2.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	940.000,00	940.000,00	940.000,00	0,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		1 Laporan	2.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun*	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.281.701.000,00	6.692.929.956,00	6.692.929.956,00	-588.771.044,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	2 Dokumen	9.546.475.135,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang / bulan	40 Orang/ bulan	40 Orang/ bulan	40 Orang / bulan	40 Orang / bulan	7.279.649.000,00	6.677.241.956,00	6.677.241.956,00	-602.407.044,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		40 Orang/ bulan	9.544.275.135,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.026.000,00	15.194.000,00	15.194.000,00	14.168.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		1 Laporan	1.100.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	65 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	1.026.000,00	494.000,00	494.000,00	-532.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		13 Laporan	1.100.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi BMD*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	462.500,00	462.500,00	462.500,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	100 Persen	1.100.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	462.500,00	462.500,00	462.500,00	0,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		5 Dokumen	1.100.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	165.122.500,00	122.080.000,00	122.080.000,00	-43.042.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	100 Persen	207.020.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	120 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		24 Dokumen	2.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		4 Dokumen	1.100.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.					
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	250 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	163.042.500,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-43.042.500,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		50 Orang	199.320.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	126.592.810,00	128.752.810,00	128.752.810,00	2.160.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	100 Persen	276.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.867.200,00	2.867.200,00	2.867.200,00	0,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		1 Paket	3.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	49.919.510,00	55.900.060,00	55.900.060,00	5.980.550,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		1 Paket	71.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.975.200,00	1.975.200,00	1.975.200,00	0,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		1 Paket	2.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.					
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	19.999.900,00	19.999.900,00	19.999.900,00	0,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		1 Paket	22.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	28 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	9.976.000,00	6.176.000,00	6.176.000,00	-3.800.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		2 Laporan	13.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	40.054.000,00	40.033.450,00	40.033.450,00	-20.550,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		2 Laporan	104.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	955.000,00	955.000,00	955.000,00	0,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		2 Dokumen	1.100.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	846.000,00	846.000,00	846.000,00	0,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		1 Dokumen	1.100.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.					
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase layanan penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	100 Persen	82.920.090,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	6 Unit	12 Unit	6 Unit	4 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		12 Unit	69.720.090,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	242.133.000,00	168.672.000,00	169.260.000,00	-72.873.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	100 Persen	285.560.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		2 Laporan	4.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	47.300.000,00	47.300.000,00	47.300.000,00	0,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		2 Laporan	58.960.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	192.833.000,00	120.372.000,00	120.960.000,00	-71.873.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		2 Laporan	212.300.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	128.042.350,00	118.382.350,00	118.382.350,00	-9.660.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	100 Persen	177.100.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	20.680.350,00	20.680.350,00	20.680.350,00	0,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		2 Unit	22.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	14 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	82.180.000,00	82.180.000,00	82.180.000,00	0,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		11 Unit	137.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.					
	6.01.01.2. 09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	990.000,00	990.000,00	990.000,00	0,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		3 Unit	2.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2. 09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	17.160.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-9.660.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		10 Unit	7.700.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	7.032.000,00	7.032.000,00	7.032.000,00	0,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		1 Unit	7.700.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**																		
		[Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan]	**Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan**	**90 persen**	**78,99 persen**	**85 persen**	**86 persen**	**86 persen**	**289.915.512,00**	**218.898.202,00**	**218.898.202,00**	**-71.017.310,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**87 Persen**	**553.850.000,00**	**-**
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	132.760.750,00	92.192.290,00	92.192.290,00	-40.568.460,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja	100 Persen	311.850.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	45 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	17.836.250,00	5.509.830,00	5.509.830,00	-12.326.420,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		9 Laporan	49.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	17 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	10.195.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	-3.795.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		3 Laporan	33.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	253 Laporan	53 Laporan	53 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	7.488.750,00	5.890.000,00	5.890.000,00	-1.598.750,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		50 Laporan	8.250.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	7.981.250,00	5.900.000,00	5.900.000,00	-2.081.250,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		1 Laporan	8.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.					
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	118 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	49.772.500,00	49.963.710,00	49.963.710,00	191.210,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		22 Laporan	123.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1.025.500,00	505.000,00	505.000,00	-520.500,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		1 Kesepakatan	1.100.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	185 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	38.461.500,00	18.023.750,00	18.023.750,00	-20.437.750,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		37 Dokumen	88.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	157.154.762,00	126.705.912,00	126.705.912,00	-30.448.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja, Masyarakat	100 Persen	242.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.095.000,00	900.000,00	900.000,00	-195.000,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		2 Laporan	11.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	530 laporan	115 laporan	130 laporan	130 laporan	100 laporan	156.059.762,00	125.805.912,00	125.805.912,00	-30.253.850,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		100 laporan	231.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**																		
		[Meningkatnya Kualitas pendampingan dan asistensi]	**Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengendalian intern perangkat daerah dan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**259.823.328,00**	**40.369.488,00**	**40.369.488,00**	**-219.453.840,00**	-	-	-	-	-	**100 Persen**	**408.100.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			penguatan integritas																	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko*	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.993.920,00	11.000.170,00	11.000.170,00	-4.993.750,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	1 Dokumen	33.550.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	6 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1.000.170,00	1.000.170,00	1.000.170,00	0,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pembera	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		1 Rekomendasi	2.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan.					
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	14 Rekomendasi	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	14.993.750,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-4.993.750,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		1 Rekomendasi	30.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan*	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	243.829.408,00	29.369.318,00	29.369.318,00	-214.460.090,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	OPD, Desa, Unit Kerja, Masyarakat	100 Persen	374.550.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	50 perangkat daerah	53 perangkat daerah	53 perangkat daerah	53 perangkat daerah	50 perangkat daerah	22.132.500,00	8.525.000,00	8.525.000,00	-13.607.500,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		50 perangkat daerah	30.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	50 perangkat daerah	53 perangkat daerah	53 perangkat daerah	53 perangkat daerah	50 perangkat daerah	3.535.500,00	985.000,00	985.000,00	-2.550.500,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		50 perangkat daerah	11.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	214.162.518,00	18.459.318,00	18.459.318,00	-195.703.200,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		5 Kegiatan	330.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.					
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	50 perangkat daerah	53 perangkat daerah	53 perangkat daerah	53 perangkat daerah	50 perangkat daerah	3.998.890,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-2.598.890,00	Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan.	7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif		50 perangkat daerah	2.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	JUMLAH								**8.555.720.000,00**	**7.492.474.306,00**	**7.493.062.306,00**	**-1.062.657.694,00**							**11.543.425.225,00**	

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan selanjutnya dirumuskan ke dalam indikator kinerja beserta targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Inspektorat Tahun 2026 sebagaimana disajikan pada tabel 3.1 di atas tidak sepenuhnya merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal tersebut disebabkan hasil keluaran (output) SIPD masih terdapat ketidaksesuaian dengan perubahan yang telah ditetapkan sehingga belum dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026. Hal ini murni karena sistem yang belum dapat menyesuaikan antara Perubahan Renja 2026 yang sudah menggunakan Renstra 2025-2029. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian dan penyusunan kembali tabel 3.1 di atas, berdasarkan perubahan yang sebenarnya agar selaras dengan Perubahan RKPD Tahun 2026.

Kemudian rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam 3 program, 11 kegiatan, dan 40 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut. berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Indikator program ini adalah persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah dengan targetnya 100% di tahun 2026. Target program ini bersifat non kumulatif, sehingga target capaiannya per tahun dari tahun 2025-2029 sampai dengan target capaian akhir renstra adalah 100%. Program ini didukung dengan 6 kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan pendanaan sebesar Rp 7.233.794.616,00. Berikut adalah penjelasan atas 6 kegiatan dan 25 sub kegiatan tersebut :

   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 1.927.000,00 yang didukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :

      1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

         Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan targetnya 5 Dokumen

yaitu Renja, RKA, RTP, PPRG dan DPA dengan pendanaan sebesar Rp 987.000,00.

2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan targetnya 1 Laporan yaitu LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) dengan pendanaan sebesar Rp 940.000,00.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun dengan target 2 jenis dan pendanaan sebesar Rp 6.692.929.956,00 yang didukung dengan 3 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan targetnya 41 orang/bulan dengan pendanaan sebesar Rp 6.677.241.956,00.

2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan targetnya 1 Laporan dan pendanaan sebesar Rp 15.194.000,00.

3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan targetnya 13 Laporan dan pendanaan sebesar Rp 494.000,00.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase layanan administrasi barang daerah dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 999.940,00 yang didukung dengan 1 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik. Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen dengan targetnya 5 Dokumen yaitu 1 Dokumen Pencatatan BMD Tahunan dan 4 Dokumen

Rekonsiliasi Triwulanan. Pendanaan atas seub kegiatan ini sebesar Rp 462.500,00.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 122.080.000,00 yang didukung dengan 3 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan targetnya 12 Dokumen mekanisme kepegawaian bulanan ke BKPSDM dan 12 Dokumen Rekap kehadiran pegawai bulanan dengan pendanaan sebesar Rp 1.040.000,00.

2) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan targetnya 4 Dokumen atas penilaian kinerja pegawai (SKP/ Sasaran Kinerja Pegawai) melalui e-kinerja dengan pendanaan sebesar Rp 1.040.000,00.

3) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan targetnya 50 Orang dengan pendanaan sebesar Rp 120.000.000,00.

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 128.752.810,00 yang didukung dengan 8 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang

Disediakan dengan targetnya 1 Paket dengan pendanaan sebesar Rp 2.867.200,00.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan targetnya 1 Paket dengan pendanaan sebesar Rp 55.900.060,00.
3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan targetnya 1 Paket dengan pendanaan sebesar Rp 1.975.200,00.
4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dengan targetnya 1 Paket dengan pendanaan sebesar Rp 19.999.900,00.
5) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
   Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan targetnya 2 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 6.176.000,00.
6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan targetnya 2 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 40.033.450,00.
7) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
   Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan targetnya 2 Dokumen dengan pendanaan sebesar Rp 955.000,00.
8) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
   Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan targetnya 1 Dokumen dengan pendanaan sebesar Rp 846.000,00.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan

perangkat daerah dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 169.260.000,00 yang didukung dengan 4 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

   Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan targetnya 2 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 1.000.000,00.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

   Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan targetnya 2 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 47.300.000,00.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

   Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan targetnya 2 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 120.960.000,00.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 118.382.350,00 yang didukung dengan 5 sub kegiatan yaitu :

   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

      Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan targetnya 2 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 20.680.350,00.

   2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

      Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan targetnya 11 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 82.180.000,00.

3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Mebel yang Dipelihara dengan targetnya 3 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 990.000,00.

4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan targetnya 10 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 7.500.000,00.

5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi dengan targetnya 1 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 7.032.000,00.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Indikator program ini adalah persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dengan targetnya 86% di tahun 2026. Program ini didukung dengan 2 kegiatan, 9 sub kegiatan dengan pendanaan sebesar Rp 218.898.202,00. Berikut adalah penjelasan atas 2 kegiatan dan 9 sub kegiatan tersebut :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 92.192.290,00 yang didukung dengan 7 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan targetnya 9 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 5.509.830,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya target pada sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pengawasan audit kinerja dan audit ketaatan.

2) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan targetnya 3 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 6.400.000,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya target pada sub kegiatan ini adalah Asistensi LKPD sebanyak 1 laporan, Asistensi Pemeriksaan

Pendahuluan BPK RI atas LKPD sebanyak 1 laporan, dan Asistensi Pemeriksaan Terinci BPK RI atas LKPD sebanyak 1 Laporan.

3) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja

   Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja dengan targetnya 50 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 5.890.000,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya target pada sub kegiatan ini adalah pelaksanaan evaluasi AKIP Perangkat Daerah sebanyak 50 laporan.

4) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan

   Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dengan targetnya 1 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 5.900.000,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya target pada sub kegiatan ini adalah pelaksanaan reviu LKPD pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri sebanyak 1 laporan.

5) Sub Kegiatan Pengawasan Desa

   Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa dengan targetnya 22 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 49.963.710,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya target pada sub kegiatan ini adalah Audit Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran Desa sesuai analisis risiko pada desa di Kabupaten Wonogiri sebanyak 22 laporan.

6) Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal

   Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk dengan targetnya 1 Kesepakatan dengan pendanaan sebesar Rp 505.000,00.

7) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

   Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan targetnya 37 Dokumen dengan pendanaan sebesar Rp 18.023.750,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya target pada sub kegiatan ini adalah Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebanyak 30 dokumen, Pengelolaan Sistem

Informasi Pengawasan (Ikhtisar Semester I dan II) sebanyak 2 dokumen, Gelar Pengawasan Daerah sebanyak 1 dokumen, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2 dokumen dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sebanyak 2 dokumen.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 126.705.912,00 yang didukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani dengan targetnya 2 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 900.000,00.

2) Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan targetnya 100 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 125.805.912,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya sub kegiatan ini beberapa diantaranya adalah pengawasan terkait Pemeriksaan Saldo Kas, Reviu DAK, Reviu Rancangan APBD, Monitoring Evaluasi Gender, Reviu RKPD, Probity Audit, Pengawasan atas Urusan Pemerintahan, Reviu ASB dan SHS, Penanganan Aduan/Kasus dan Pengawasan Mandatori lainnya diluar pengawasan reguler yang ditujukan khusus pengawasan dengan tujuan tertentu.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi.

Indikator program ini adalah persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengendalian intern perangkat daerah dan penguatan integritas dengan targetnya 100% di tahun 2026. Program ini didukung dengan 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan pendanaan sebesar Rp 40.369.488,00. Berikut adalah penjelasan atas 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan tersebut :

a. Kegiatan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Kegiatan ini diukur dengan indikator jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dengan targetnya 1 Dokumen

dengan pendanaan sebesar Rp 11.000.170,00 yang didukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
   Sub kegiatan ini diukur dengan indikator jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun targetnya 1 Rekomendasi untuk penyusunan PKPT Tahun 2027 dengan pendanaan sebesar Rp 1.000.170,00.
2) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
   Sub kegiatan ini diukur dengan indikator jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun dengan targetnya 1 Rekomendasi yang digunakan untuk memfasilitasi Rapat Koordinasi terkait Kebijakan dalam Aktivitas Pengawasan yang dilaksanakan di Luar Daerah dengan pendanaan sebesar Rp 10.000.000,00.

b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
   Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan dengan targetnya 100% dengan pendanaan sebesar Rp 29.369.318,00 yang didukung dengan 4 sub kegiatan yaitu :

   1) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
      Sub kegiatan ini diukur dengan indikator jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah dengan targetnya 50 perangkat daerah dengan pendanaan sebesar Rp 8.525.000,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pendampingan dalam Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi beserta Penjaminan Kualitasnya termasuk di dalamnya pendampingan dan asistensi penyusunan Register Risiko (RR) bagi semua perangkat daerah di Kabupaten Wonogiri sebanyak 50 perangkat daerah.
   2) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
      Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan

Penilaian Reformasi Birokrasi dengan targetnya 50 perangkat daerah yang dicapai dengan pelaksanaan Evaluasi Internal RB secara triwulanan dengan pendanaan sebesar Rp 985.000,00.

3) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

   Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan targetnya 5 kegiatan dengan pendanaan sebesar Rp 18.459.318,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya sub kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan atas MCSP, Gratifikasi, Saber Pungli, Desa Antikorupsi, dan Survei Penilaian Integritas (SPI).

4) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

   Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan targetnya 50 perangkat daerah dengan pendanaan sebesar Rp 1.400.000,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya sub kegiatan ini adalah pelaksanaan monitoring Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) pada semua perangkat daerah Kabupaten Wonogiri sebanyak 50 perangkat daerah melalui pengumpulan Bukti Setor Pajak (SPT) bagi LHKAN dan bukti lapor kekayaan bagi LHKPN serta pelaksanaan pembangunan ZI (Zona Integritas).

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri tahun 2026. Penyusunan Perubahan Renja tahun 2026 lebih bersifat operasional sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud, sehingga akan diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029. Selanjutnya Renja akan menjadi pedoman penyusunan RKA Perubahan Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2026.

Perubahan berbagai kebijakan pengawasan sangat sulit diprediksi sehingga pelaksanaan Renja Inspektorat tahun 2026 ini dapat saja berubah, namun secara prinsip seluruh yang tertuang dalam Renja ini merupakan hasil kajian terhadap seluruh kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan yang terjadi tetap dalam upaya pencapaian sasaran utama bidang pengawasan di Kabupaten Wonogiri sehingga diharapkan seluruh unsur di Inspektorat tetap selalu menjadikan Renja ini sebagai pedoman utama dalam menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026.

Keberhasilan pelaksanaan Renja sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif, komitmen dan koordinasi yang kuat dari semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Hasil kinerja Renja nantinya akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan Inspektorat Kabupaten Wonogiri, untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja di tahun berikutnya sehingga kinerja Perangkat Daerah, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Wonogiri dapat terukur, bermanfaat dan berkesinambungan.

Dokumen Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2026 yang telah tersusun ini diharapkan mampu menjadi pedoman dalam menjalankan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah ada dan dianggarkan di tahun 2026. Pada bab penutup ini Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 mencakup tiga bahasan yaitu :

4.1 Catatan Penting

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan seperti yang telah tertuang dalam dokumen Perubahan Renja ini diharapkan dapat mencapai keberhasilan sesuai yang direncanakan. Namun, bukan tidak mungkin terjadi beberapa hal/risiko yang berpotensi menghambat pelaksanaan tersebut, seperti :

1. Risiko atas kurangnya komitmen dari Perangkat Daerah lainnya dalam mendukung pencapaian sasaran di Inspektorat Kabupaten Wonogiri karena sebagian besar keberhasilan atas indikator sasaran di Inspektorat Kabupaten Wonogiri merupakan hasil kerjasama dengan lintas OPD;
2. Risiko bertambahnya aktivitas pengawasan yang bersifat mandatory sehingga mengubah jadwal pelaksanaan aktivitas pengawasan reguler lainnya;
3. Risiko keterlambatan penerbitan LHP (Laporan Hasil Pengawasan) karena jumlah SDM Pengawas yang terbatas;
4. Risiko atas kurangnya atensi untuk keberlanjutan manfaat/dampak dari aktivitas pengawasan yang sudah terlaksana (Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pengawasan oleh APIP Inspektorat Kabupaten Wonogiri kurang mendapat perhatian secara internal maupun Perangkat Daerah terkait) karena keterbatasan SDM pengelola TLRHP di Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Kemudian untuk mengatasi kemungkinan risiko tersebut, berikut beberapa rencana pengendaliannya :

1. Meningkatkan peran aktif Inspektorat sebagai penggerak OPD lainnya untuk mendukung pencapaian sasaran;
2. Perlu dilakukan analisis atas aktivitas pengawasan prioritas agar aktivitas pengawasan mandatory dapat terlaksana lebih dulu serta pemanfaatan SDM APIP yang ada secara gabungan untuk melaksanakan beberapa aktivitas pengawasan reguler lainnya;
3. Meningkatkan motivasi kinerja dan pemberian penghargaan atas capaian terbaik dari APIP dalam penerbitan LHP tepat waktu;
4. Keterlibatan semua Tim Pengawas dalam menangani TLRHP pada masing-masing Bidang Pengawasan sesuai aktivitas pengawasan yang dilaksanakan di Tim selama SDM penanggungjawab atas TLRHP belum tersedia.

Keberhasilan pelaksanaan Renja sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif dan komitmen yang kuat serta koordinasi yang kuat dari semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Hasil kinerja Renja nantinya akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja di tahun berikutnya sehingga kinerja Perangkat Daerah, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Wonogiri, dapat terukur, bermanfaat dan berkesinambungan. Kemungkinan atas perubahan yang terjadi dalam upaya pencapaian sasaran utama pelaksanaan pengawasan, diharapkan seluruh unsur di Inspektorat Kabupaten Wonogiri tetap menjadikan Dokumen Perubahan Renja ini sebagai pedoman utama aktivitas pengawasan tahun 2026.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam hal ini adalah Perangkat Daerah yang mempunyai output untuk menyusun laporan hasil pengawasan mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk penentuan kebijakan di Pemerintah Kabupaten Wonogiri, sehingga program dan kegiatan di Inspektorat yang sudah direncanakan diharapkan tetap dapat berjalan dengan optimal. Oleh karena itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. melaksanakan Renja 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas pokok dan kewenangan organisasi;
2. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. dalam rangka efektivitas pelaksanaannya dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala melalui laporan bulanan atas capaian target kinerja dan laporan triwulanan atas monitoring evaluasi Perjanjian Kinerja (PK).

4.3 Manajemen Risiko

Dalam bab-bab sebelumnya telah diuraikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 serta berbagai penyesuaian terhadap target kinerja, program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaannya. Perubahan tersebut sebagai tindak lanjut atas perkembangan

kebijakan, regulasi, dan kondisi pelaksanaan yang terjadi selama tahun berjalan, sehingga berpotensi mengubah tingkat risiko maupun risiko-risiko yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja. Oleh karena itu, dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026 perlu dilakukan pemetaan ulang risiko sebagai dasar untuk memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian yang direncanakan tetap relevan dan efektif.

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan risiko yang meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi tingkat risiko, penetapan prioritas risiko, serta penyusunan rencana tindak pengendalian. Pemetaan ulang risiko dalam Perubahan Renja Tahun 2026 dilakukan untuk menyesuaikan kondisi terkini organisasi sehingga risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat diantisipasi melalui langkah-langkah pengendalian yang tepat. Hasil pemetaan risiko operasional tersebut disajikan pada Tabel 4.1 berikut.:

Tabel 4.1

Perubahan Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Operasional
Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2026

Program	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak	Skala Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Target Penyelesaian
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Rekomendasi hasil pengawasan tidak segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah	Komitmen perangkat daerah kurang, keterbatasan sumber daya, dan masih lemahnya monitoring	Perbaikan tata kelola tidak optimal dan terjadi risiko berulang	9	Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut secara Rutin Berkala	Inspektur Pembantu	Triwulan IV
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pendampingan dan Asistensi dalam Pengendalian Intern dan Penguatan Integritas	Pelaksanaan pendampingan dan asistensi tidak sepenuhnya efektif dalam Pengendalian Intern dan Penguatan Integritas	Perumusan tujuan dan rekomendasi tidak sepenuhnya tepat	Tidak memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja daerah	9	Peningkatan kompetensi SDM dan reviu berjenjang	Inspektur Pembantu	Triwulan IV
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Pengembangan inovasi perangkat daerah belum berjalan optimal	Kurangnya budaya inovasi	Kualitas pelayanan publik stagnan	12	Mengoptimalkan implementasi agen perubahan	Sekretaris	Triwulan IV

Program	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak	Skala Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Target Penyelesaian
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Belum semua target kinerja tercapai sesuai rencana	Monitoring dan evaluasi internal belum berjalan optimal	Target kinerja tidak tercapai sesuai rencana	9	Cukup dikelola dengan pengendalian yang ada melalui rapat capaian kinerja berkala	Sekretaris	Triwulan IV
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Implementasi tata kelola organisasi belum sepenuhnya sesuai SOP	Pemahaman aparatur terbatas dan komitmen belum merata	Efektivitas organisasi tidak tercapai	9	Sosialisasi SOP minimal 1 kali dalam setahun	Sekretaris	Triwulan IV
	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintah Daerah	Pelaporan kinerja administrasi pemerintah daerah tidak tepat waktu dan tidak sesuai ketentuan	SOP yang dimiliki belum lengkap	Informasi dalam laporan menjadi tidak relevan untuk pengambilan keputusan	9	Cukup dikelola dengan pengendalian yang ada melalui rapat capaian kinerja berkala	Sekretaris	Triwulan IV

Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak	Skala Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Target Penyelesaian
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	a. Pelaksanaan kegiatan pengawasan internal tidak sesuai jadwal rencana tahunan	a. Permintaan pemeriksaan mendadak di luar rencana tahunan	a. Pengawasan terlambat dari yang direncanakan dan kinerja tidak tercapai tepat waktu	12	a. Cukup dikelola dengan pengendalian yang ada melalui rapat operasional bulanan untuk menentukan prioritas pengawasan bulanan	Inspektur Pembantu	Triwulan IV
		b. Terjadinya gratifikasi/ suap dalam pengawasan intern	b. Kurangnya integritas	b. Mengurangi kepercayaan publik dan terjadinya kasus korupsi	9	b. Pembaharuan penandatanganan pakta integritas		
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	a. Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu tidak tepat waktu sesuai rencana tahunan	a. Permintaan pemeriksaan mendadak di luar rencana tahunan	a. Pengawasan terlambat dari yang direncanakan	12	a. Cukup dikelola dengan pengendalian yang ada melalui rapat operasional bulanan untuk menentukan prioritas pengawasan bulanan	Inspektur Pembantu	Triwulan IV
		b. Terjadinya gratifikasi/ suap dalam pengawasan dengan tujuan tertentu	b. Kurangnya integritas	b. Mengurangi kepercayaan publik dan terjadinya kasus korupsi	9	b. Pembaharuan penandatanganan pakta integritas		

Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak	Skala Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Target Penyelesaian
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	Penyusunan dokumen perencanaan pengawasan berbasis risiko belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan perencanaan pengawasan	Ketersediaan data risiko terbatas karena kapasitas perencana belum optimal	Tujuan pengawasan tidak efektif	12	a. Mendorong percepatan penyusunan RR dan RTP Pemda/OPD b. Rakor penyusunan PKPT Berbasis Risiko	Inspektur Pembantu	Triwulan IV
Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	Perumusan tujuan dan ruang lingkup dalam penugasan pendampingan dan asistensi belum tepat	Pemahaman pengawas yang masih kurang	Pendampingan dan asistensi tidak memberikan nilai tambah bagi perbaikan tata kelola pemerintahan	9	Peningkatan kompetensi SDM	Inspektur Pembantu	Triwulan IV
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	Keselarasan antar dokumen masih belum sesuai	Lemahnya koordinasi	Dokumen tidak dapat menjadi dasar penentuan keputusan secara efektif	6	-	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV
Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	a. Aktivitas pengeluaran / belanja tidak didukung dengan	Lemahnya pengendalian internal	a. Pertanggungjawaban keuangan tidak akurat dan akuntabilitas tidak terjaga	6	-	Kepala Sub Bagian Keuangan	Triwulan IV

Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak	Skala Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Target Penyelesaian
		dokumen pertanggung jawaban b. Penyalahgunaan kewenangan dalam pencairan		b. Terjadinya tindak korupsi	6	a. Pembinaan integritas secara berkala b. Peningkatan kompetensi/ pemahaman sistem pengendalian intern keuangan		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah	a. Data aset tidak dilakukan pembaharuan b. Hilangnya aset secara ilegal	a. Monitoring tidak dilakukan secara berkala b. Pengamanan aset belum optimal	a. Ketidaksesuaian laporan Barang Milik Daerah b. Kerugian daerah	6 9	- Cukup dikelola dengan pengendalian yang ada dengan penandatanganan pakta integritas penggunaan dan penanggungjawab Barang Milik Daerah setiap tahun	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah tidak sesuai standar pelayanan	Keterlambatan input data kepegawaian	Keterlambatan layanan kepegawaian	6	-	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV

Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak	Skala Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Target Penyelesaian
Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Layanan administrasi umum perangkat daerah belum sepenuhnya sesuai kebutuhan	Identifikasi kebutuhan belum dilakukan secara rinci	Pelayanan administrasi umum lambat	6	-	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase layanan penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Adanya kolusi antara rekanan dan perangkat PBJ	Kurangnya integritas pegawai	Kerugian keuangan daerah	9	Cukup dikelola dengan pengendalian yang ada terkait pakta integritas dan kode etik	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV
Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan tidak sesuai kebutuhan perangkat daerah dan tidak dikelola tepat waktu	Identifikasi kebutuhan jasa dan belanja operasional belum akurat	Menghambat layanan penyediaan jasa penunjang (termasuk jasa surat menyurat, pembayaran tagihan bulanan, pembayaran gaji non-ASN, serta pembelanjaan perabot kantor)	6	-	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV

Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak	Skala Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Target Penyelesaian
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	Pemeliharaan barang milik daerah belum optimal	Identifikasi pemeliharaan barang belum memadai	Menghambat tugas-tugas operasional kantor	9	Menyusun jadwal pemeliharaan rutin	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV